

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Pada bagian simpulan ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis dan temuan peneliti. Dari hasil penelitian dan pembahasan diambil garis besar atau simpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat simpulan umum dan simpulan khusus. Adapun simpulan umumnya ialah: “Harapan masyarakat setelah berdirinya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran sebagian besar telah terealisasi dengan hasil yang positif. Namun dalam pembangunan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran ini tidak luput dari hambatan dan kekurangan”. Sedangkan simpulan khususnya terdiri dari:

1. Persepsi masyarakat mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran terbagi kedalam dua kelompok. Pertama, masyarakat yang paham betul mengenai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran yang berasal dari kalangan pegawai pemerintah. Kedua, masyarakat yang kurang paham akan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran yang berasal dari kalangan masyarakat umum. Masyarakat yang tidak memahami adalah mereka yang tidak memiliki kecenderungan dan perhatian terhadap objek persepsi, serta sudut pandang yang sempit. Jika tidak diluruskan dikhawatirkan akan menimbulkan sikap pesimis dan skeptis.
2. Dampak yang dirasakan masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru merupakan dampak positif. Terdapat enam sektor yang dirasakan berubah setelah berdirinya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, yaitu: (a) kinerja pemerintah dan pelayanan publik, (b) infrastruktur, (c) pariwisata, (d) ekonomi, (e) pendidikan, dan (f) kesehatan. Dampak yang paling menonjol adalah kemudahan akses dan jarak tempuh bagi masyarakat menuju kantor pemerintahan, serta sektor pariwisata yang terus ditingkatkan. Namun pada masyarakat yang tidak memahami konsep Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, mereka belum merasakan perubahan yang signifikan dari berdirinya

Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan persepsinya yang rendah tentang Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran dan sudut pandang yang sempit.

3. Ekspektasi (harapan) masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru secara umum adalah menginginkan adanya kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang merdeka dan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Pada dasarnya harapan tersebut timbul seiringan dengan dibentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, karena masyarakat merasa sebelum mereka mandiri dan masih bagian dari Kabupaten Ciamis, kesejahteraan tersebut tidak dapat diraih.
4. Realisasi dari ekspektasi (harapan) masyarakat yang mana menginginkan adanya kemajuan dan kesejahteraan sebagian besar telah berjalan. Dalam upayanya mewujudkan harapan masyarakat, pemerintah merancang pembangunan dalam tiga tahap, yaitu pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka panjang. Dan pembangunan tersebut sebagian besar khususnya pembangunan jangka pendek telah dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Namun dalam upaya merealisasikan harapan masyarakat terdapat beberapa hambatan, yaitu kurangnya SDM yang mumpuni, pendanaan yang belum stabil, serta partisipasi masyarakat yang dinilai masih kurang.

## **B. Implikasi**

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil temuan dalam penelitian. Sebagai sebuah penelitian di bidang otonomi daerah tentunya memiliki implikasi dalam bidang pemerintahan. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian memiliki kontribusi terhadap evaluasi kinerja pemerintahan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.
2. Hasil penelitian memiliki kontribusi dalam menggambarkan situasi dan kondisi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran.

3. Hasil penelitian dapat mengarahkan masyarakat sebagai penduduk kabupaten Pangandaran untuk senantiasa mendukung dan membantu pembangunan daerah otonomi baru.

### **C. Rekomendasi**

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan hasil dari simpulan. Rekomendasi berisikan anjuran-anjuran mengenai pelaksanaan pemerintahan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran. Rekomendasi ini ditujukan kepada beberapa pihak. Adapun rekomendasi tersebut diantaranya ialah:

#### **1. Bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran**

Kinerja pemerintah hendaknya selalu ditingkatkan dan selalu mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia harus terus berjalan, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, serta sosialisasi mengenai pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka panjang, agar tidak terjadi kesimpangsiuran maupun kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah.

#### **2. Bagi Masyarakat Kabupaten Pangandaran**

Masyarakat berkewajiban untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik partisipasi dalam bentuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, berpartisipasi dalam membantu kelangsungan pembangunan daerah, maupun ikut serta memajukan perekonomian dan kesejahteraan daerah setempat.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya.**

Untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, diharapkan penelitian yang dilakukan lebih mendalam dan lebih baik lagi. Dengan menggunakan subjek yang sama tetapi dengan data yang terbaru dan metode penelitian yang berbeda. Sehingga hasil penelitian yang akan dihasilkan nantinya akan lebih bervariasi dan lebih bersifat membangun.

#### **4. Bagi Departemen PKn**

Departemen PKn sebagai lembaga edukasi yang juga memiliki kaitan dengan masalah otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan tuntunan atau arahan bagi terselenggaranya pemerintahan otonomi daerah. Khususnya yang berkaitan dengan masalah teoritis dan praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk keberlangsungan otonomi daerah yang lebih baik.